

**MODAL SOSIAL PADA KOMUNITAS NELAYAN DI PULAU BAAI
(Studi pada Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)**

Oleh

Heni Nopianti dan Nia Elvina
Jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This research tries to describe social capital of Pulau Baai fisherman with regard to three main element of social capital: trust, institution and social network. Data and information gathered by using snowball sampling technique by through indepth interview, observation. Reseach shows that trust, institution and social network contribute in creating autonomous community.interrelation among those three elements will enhance trust between individu or group and in turn become a basis for community empowerment.

Keywords: social capital, trust, institutions, social network

PENDAHULUAN

Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 5,8 juta km² laut atau 70% dari luas total Indonesia. Potensi tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai dilaut serta pariwisata bahari (Harsono, dalam Abu Bakar, 2001). Potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, selain kekayaan sumberdaya alam tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Melihat potensi perikanan yang ada, masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir seharusnya merupakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Namun kenyataan yang ada sebagian besar dari mereka masih jauh dari sejahtera. Bahkan sering dikatakan bahwa mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain (Adisel, 2003)

Persoalan yang paling dominan yang dihadapi di wilayah pesisir justru malah kemiskinan nelayan. Masalah yang paling mendasar adalah mengapa mereka miskin atau setidaknya tidaknya dianggap miskin, sementara sumber daya laut melimpah. Melihat besarnya sumber daya laut yang tersedia, sulit dimengerti bahwa kemiskinan yang

menimpa sebagian besar masyarakat nelayan merupakan kemiskinan alamiah. Sementara itu sekian banyak kebijakan pemerintah berbentuk program pengentasan kemiskinan telah digulirkan, tetapi hasilnya belum mampu mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan, kebijakan-kebijakan orde baru sampai saat ini lebih bersifat karitatif (*charity*) ketimbang memberikan solusi terhadap kemiskinan; terbukti bahwa model seperti ini banyak mengalami kegagalan ditingkat implementasi (Karim, 2003:4)

Penyebab *utama* kegagalan program-program pengentasan kemiskinan di kalangan nelayan adalah pendekatan yang dilakukan lebih bersifat structural dan mengabaikan aspek-aspek cultural yang berkembang dimasyarakat (Karim, 2003:6). Akibatnya program-program itu mengalami hambatan pada tataran implementasi yang acapkali tidak diungkapkan oleh pemerintah. *Kedua*, terjadinya kebocoran dan program ditingkat implementasi yang disebabkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara oknum pemerintah yang menjadi *rent seeker* dengan konsultan pelaksana program. Proses ini terjadi sejak program ditenderkan ataupun pada proses penunjukkan konsultan yang juga dilakukan pemerintah. *Ketiga*, program-program tersebut tidak memiliki jaminan keberlanjutan (*sustainability*) dan akuntabilitas public (*public accountability*). Hal ini disebabkan program-program itu berbentuk “proyek” sehingga setelah proyek selesai para konsultan pelaksana tidak peduli lagi apakah program itu berjalan atau tidak (Karim, 2003:7). Merujuk pada situasi yang dipaparkan diatas, perlu revitalisasi pendekatan-pendekatan program pemberdayaan ekonomi nelayan miskin. Pendekatan pemberdayaan sebaiknya mengarah pada pendekatan cultural. Aspek yang diperhatikan dalam pendekatan ini adalah *social capital* (modal social) masyarakat sebagai unsur yang berpengaruh dalam program pemberdayaan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi dikumpulkan dari sejumlah informan yang dipilih berdasarkan teknik *snowball sampling*. Sementara, data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi . Analisis data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis yang lazim berlaku dalam penelitian kualitatif yang meliputi pengujian, pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa dan merenungkan kembali data yang dilakukan

secara berulang untuk membangun inferensi-inferensi, menguji kembali inferensi dan kemudian menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman eksistensi modal social komunitas nelayan baik pada tataran konsepsi maupun praksis kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari tiga elemen utama, yakni (1) hubungan saling percaya; (2) pranata; dan (3) jaringan social

1. Hubungan Saling Percaya

1.1 Kejujuran

Kejujuran dikonsepsikan sebagai sebuah hubungan diantara anggota dan kelompok nelayan yang dilakukan tulus ikhlas dan tanpa kecurangan berdasarkan pada standar nilai yang disepakati bersama. Individu dan atau kelompok yang berperilaku diluar standar nilai yang disepakati tersebut dipandang telah melakukan ketidakjujuran. Nilai kejujuran dikalangan nelayan terinternalisasi dalam kehidupan berkelompok. Berdasarkan hasil wawancara, kasus penerapan nilai kejujuran dalam pemanfaatan kelompok nelayan ini bias dilihat dari kelompok nelayan Bengkulu Serikat yaitu setiap penggunaan dana kelompok / uang kas selalu dilaporkan kepada anggota secara terbuka melalui rapat bulanan. Kemudian bagi anggota yang ingin meminjam uang kas biasanya harus dapat menunjukkan bukti seerti mesin kapal rusak, kapal / perahu rusak, atau anggota sakit. Hal ini penting agar uang yang dipinjam benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh si peminjam.

1.2 Kewajaran

Kewajaran dikalangan kelompok nelayan dapat dilihat dari cara penerapan aturan ataupun dijatuhkannya sanksi yang tegas oleh ketua kelompok nelayan kepada anggotanya begitupun sebaliknya. Selanjutnya aturan untuk menjadi anggota kelompok nelayan di Pulau Baai umumnya sama, karena tujuan didirikannya kelompok nelayan ini adalah untuk membantu mereka ketika kesulitan dalam keuangan. Contoh praktisnya seperti, aturan yang berlaku adalah anggota wajib membayar simpanan wajib Rp. 40.000 dan iuran wajib yang besarnya Rp 5.000 untuk Kelompok Nelayan Wanita Usaha Mandiri dan Rp 10.000 bagi kelompok nelayan Bengkulu Serikat. Sanksi yang diterapkan bagi anggota yang tidak memenuhi

kewajibannya, yaitu ia tidak akan dipinjami lagi dan akan berlaku juga bagi anggota keluarganya.

1.3 Egaliter

Pada tataran konsep, sikap egaliter memandang semua kelas social mempunyai proporsi unsur-unsur yang hampir sama. Pada tataran praktis, sikap egaliter di kalangan nelayan Pulau Baai ditunjukkan oleh sebuah system yang ada dalam kelompok nelayan yang tidak membeda-bedakan kedudukan seseorang untuk menjadi pemimpin dan atau dalam distribusi kerja. Sikap egaliter ditunjukkan dari adanya kerjasama yang baik antara juragan dan buruh atau dengan kata lain juragan turun langsung ke laut dan tidak hanya memerintah saja. Ia juga ikut mengerjakan pekerjaan buruh misalnya sama-sama memperbaiki jaring, sama-sama menarik jala sehingga konsekuensinya adalah juragan lebih bijak kepada buruhnya. Dengan kata lain juragan tidak mudah marah-marrah kepada buruh ketika ia melakukan kesalahan. Dan walaupun dalam sistem bagi tiga, tetapi biasanya juragan akan menambah bagian buruh sebanyak 5% dari hasil melaut tersebut; terjadi pergeseran nilai kelas nelayan dalam kelompok, dimana hak dan kewajiban anggota tidak ditentukan oleh statusnya dalam komunitas nelayan, melainkan berdasarkan pada hak dan kewajiban sebagai anggota dan atau pengurus kelompok. Dengan kata lain, ketika masuk anggota kelompok, maka telah terjadi peninggalan atribut kelas nelayan, dan selanjutnya mereka menggunakan atribut kelompok, apakah dia sebagai anggota atautkah sebagai pengurus.

1.4 Toleransi

Secara konseptual, toleransi identik dengan sikap menahan diri terhadap sikap pihak lain yang tidak disetujui. Dalam tataran praktis, toleransi seringkali berupa pengecualian bagi seseorang yang tidak bisa mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati dengan pertimbangan kemanusiaan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran akan toleransi dikalangan anggota kelompok nampaknya sudah sangat tinggi, sehingga tidak seorangpun berani untuk melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan kelompok pada dirinya. Toleransi bagi kelompok terhadap anggotanya sebagai sebuah media untuk menciptakan kerukunan dan kebersamaan.

1.5 Kemurahan Hati

Dalam tataran abstrak, kemurahan hati merupakan sikap untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Operasionalisasi kemurahan hati ini dapat berupa sukarela memberi tenaga, waktu, dan materi untuk keberhasilan tujuan kelompok. Aktifitas pengelolaan kelompok nelayan disikapi sebagai sebuah aktifitas untuk ajang pengabdian kepada masyarakat, dan sebagai bagian dari amal ibadah. Bentuk kemurahan hati nelayan dapat dilihat dari kerelaan untuk menolong sesama nelayan dan atau bukan nelayan yang mengalami musibah di laut. Bentuk kemurahan hati ditunjukkan oleh kesediaan para nelayan mengorbankan tenaga, waktu, dan bahkan biaya untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan di laut. Menurut salah seorang informan, nilai ini berlaku untuk setiap nelayan dan bukan hanya nelayan di Pulau Baai.

2. Pranata

2.1 Nilai-nilai yang Dianut Bersama

Nilai bersama dikonsepsikan sebagai nilai-nilai yang dianut bersama yang mengacu kepada cita-cita dan tujuan bersama. Dalam tataran praktis, nilai bersama tersebut ditunjukkan oleh pandangan yang menganggap penting kebersamaan dalam menanggulangi masalah yang dihadapi komunitas dan atau kelompok, serta nilai tinggi kerjasama kolektif. Nilai-nilai yang dianut dikalangan Pulau Baai yakni, menilai penting sikap kebersamaan dalam menanggulangi masalah yang dihadapi anggota kelompok; sikap mereka yang menilai tinggi kerjasama; juga dapat diamati dari praksis kehidupan keseharian nelayan ketika sedang melaut, misalnya dalam menebar jaring, seharusnya tugas buruh tetapi dalam prakteknya juragan juga membantu melakukannya. Pada waktu perahu akan melaut mereka bersama-sama melakukannya, tidak melihat kedudukan seseorang, apakah ia seorang juragan atau seorang buruh. Nilai bersama juga dikembangkan dalam kehidupan berkelompok, yakni menilai tinggi kebersamaan dan kekompakan.

2.2 Norma-norma dan Sanksi-sanksi

Norma dan sanksi dikonsepsikan sebagai suatu aturan sosial atau patokan berperilaku yang pantas. Sementara sanksi merupakan konsekuensi dari hukuman terhadap penyimpangan norma atau berperilaku tidak pantas berdasarkan ukuran lingkungan sosialnya. Norma yang umum berlaku dalam komunitas dan atau kelompok nelayan di Pulau Baai adalah tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jika seseorang

yang melanggar norma tersebut, maka ia akan dikucilkan dari pergaulan nelayan, baik dalam kelompoknya, maka anggota kelompok lain akan menerapkan sanksi social dalam bentuk-bentuk pengucilan dalam pergaulan dan aktifitas-aktifitas tertentu.

2.3 Aturan-aturan

Aturan-aturan dalam konteks modal social merupakan pedoman mengenai perilaku yang dikehendaki atau dianggap pantas. Aturan yang menonjol dalam komunitas nelayan adalah system bagi hasil yang berlaku bagi semua juragan dan anak buah. Aturan tersebut berkembang sejak lama dan disepakati sebagai sebuah pedoman untuk melakukan aktifitas tangkap dan penjualannya. Karim (2003:3) berpendapat bahwa system bagi hasil merupakan modal social dalam bentuk kelembagaan lokal yang dimiliki oleh nelayan. Berkenaan dengan hasil tangkapan ikannya, banyak atau sedikitnya hasil tangkapan sama sekali tidak berpengaruh terhadap system pembagian hasil ikan diantara juragan kapal/perahu, juragan kepala, awak kapal, serta orang-orang lain terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan operasi penangkapan ikan. Berapapun hasil penangkapan ikan, system pembagian hasilnya tetap tidak berubah.

Aturan-aturan urgen yang berlaku didalam komunitas (kelompok-kelompok) nelayan Pulau Baai adalah aturan untuk menangkal tidak kembalinya pinjaman; Norma yang berlaku bagi di dalam kelompok-kelompok nelayan yang ada di komunitas nelayan Pulau Baai, yaitu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Sanksi yang umumnya berlaku didalam kelompok-kelompok nelayan bagi individu/anggota kelompok yang mementingkan diri sendiri ia akan tersisih di kelompok dan masyarakat.

3. Jaringan Sosial

3.1 Partisipasi

Dalam perspektif modal social, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang dan atau kelompok dalam suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu. Dalam tataran praksis, konsep partisipasi ini mencerminkan dari keterlibatan anggota, baik dalm perencanaan, maupun pelaksanaan suatu kegiatan secara proporsional. Bentuk keterlibatan anggota kelompok dapat dicerminkan dari pelaksanaan musyawarah dalam rangka menentukan rencana kerja dan peraturan kelompok. Musyawarah merupakan media komunikasi dan informasi untuk membuat kebijakan kelompok dalam rangka pencapaian tujuan dan kepentingan bersama.

3.2 Pertukaran Timbal Balik

Pertukaran timbale balik dikonsepsikan sebagai hubungan timbal balik antara dua pihak yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Pada tataran komunitas nelayan. Kasus timbal balik ini sangat jelas jual beli hasil tangkapan diantara pelaku transaksi tersebut. Transaksi jual-beli ikan/udang nelayan di Pulau Baai pada umumnya dilakukan di darat seperti di dalam masyarakat nelayan Bengkulu lainnya. Aktifitas jual-beli tersebut terjadi antara (1) nelayan, juragan perahu, juragan kepala; (2) bakul ikan; dan (3) tengkulak. Banyak kasus dilapangan memperlihatkan bahwa hubungan jual-beli ikan antara para nelayan dan juragan kepala satu pihak, dan para bakul di lain pihak sering bersifat 'mengikat', daripada atas dasar 'sukarela'. Sementara itu, pertukaran timbale balik di dalam kelompok-kelompok nelayan di Pulau Baai dapat dilihat dari adanya pergiliran dalam kepengurusan kelompok nelayan, seperti pada kelompok nelayan Wanita Usaha Mandiri.

3.3 Solidaritas

Solidaritas di dalam kelompok-kelompok nelayan Pulau Baai dapat dilihat pada saat pelaksanaan musyawarah kelompok. Solidaritas ini berbentuk semua anggota mendukung keputusan kelompok meskipun ada bagian-bagian yang tidak setuju. Misalnya dalam pemilihan ketua kelompok, jika si-A sudah terpilih atau mendapatkan suara terbanyak maka pendukung si-B yang tidak terpilih harus mematuhi keputusan kelompok atau dalam hal memutuskan iuran terbaru. Selanjutnya solidaritas di dalam kelompok-kelompok nelayan yang ada di pulau Baai tercermin dari adanya kemauan pengurus kelompok dan anggota untuk berkorban demi kepentingan kelompok. Sikap solidaritas ini juga tercermin dari perilaku nelayan manakala menemukan nelayan lain dalam kesulitan di laut. Solidaritas nelayan akan Nampak tinggi manakala teman senasibnya mengalami musibah. Rasa kesetiakawanan ditunjukkan dengan cara melakukan hal-hal yang sekiranya dapat meringankan beban ahli musibah.

3.4 Kerjasama

Kehidupan para nelayan Pulau Baai bulanlah bersifat individual, tetapi berkelompok. Setiap kelompok nelayan terdiri dari : juragan pemilik perahu, juragan kepala perahu dan nelayan buruh / awak perahu. Sebagai sebuah (organisasi) kelompok nelayan, pola relasi kerja, baik antara juragan perahu, juragan kepala atau antar nelayan sendiri, tidak terjadi dalam kerangka hubungan kerja antara atasan dan bawahan yang

bersifat hubungan pengabdian, tetapi lebih bersifat kolegalisme dan kekeluargaan, sekalipun terdapat klasifikasi diantara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan diantara merekapun sangat longgar, terbuka, suka hati, dan didasarkan atas 'kesertaan secara sukarela', tetapi dalam kasus-kasus tertentu bahkan seorang juragan pemilik perahu harus merekrut anggota nelayannya dengan cara 'membeli'. Hal ini menunjukkan betapa faktor-faktor sosial budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara di lain pihak, kerjasama di dalam kelompok-kelompok nelayan yang ada di Pulau Baai dapat dilihat dari partisipasi aktif semua anggota kelompok nelayan dalam membayar iuran wajib dan simpanan wajib. Bagi pengurus mereka aktif mengadakan penagihan simpanan/iuran wajib, mengadakan penagihan peminjaman, membuat laporan keuangan, melayani anggota yang mau meminjam.

3.5 Keadilan

Dalam perspektif modal social, keadilan identik dengan persamaan kedudukan, kesempatan, dan perlakuan. Namun demikian, dimensi keadilan cenderung berbeda pada tataran kelompok dan tataran komunitas. Apabila dikaji pola pembagian hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, nampak bahwa telah terjadiketidakadilan yang dilakukan juragan terhadap para awak kapalnya. Dari sudut ekonomi, perhitungan pola pembagian hasil sangat tidak masuk akal, namun dari pandangan awak kapal pembagian tersebut cukup adil sehingga tidak menimbulkan gejolak atau protes. Para awak kapal memandang bahwa proporsi bagian juragan memang seharusnya besar mengingat resiko yang harus ditanggung olehnya cukup tinggi. Selain itu, para awak kapal sangat bergantung kepada 'kemurahan' juragan pada saat musim paceklik atau pada saat tidak bisa melaut. Segala kebutuhan keluarga awak kapal akan ditanggung sementara oleh juragan. Konsep timbal balik antara juragan dan anak buah kapal kembali mewarnai pola hubungan tersebut. Namun demikian, dari sudut perhitungan ekonomi pola pembagian hasil tersebut sangat menyentuh rasa keadilan, karena keuntungan yang lebih besar justru jatuh ke tangan juragan kapal. Sementara itu, konsep keadilan relatif berbeda pada tataran kelompok. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, yang dimaksud dengan keadilan adalah jika ketua kelompok dalam menegakkan aturan, menjatuhkan sanksi tanpa pilih kasih. Dalam konteks modal sosial, keadilan ini harus ditunjukkan oleh persamaan kesempatan dan perlakuan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Social pada dasarnya merupakan salah satu komponen modal dalam masyarakat disamping modal lain seperti modal manusia, modal sumber daya alam, modal fisik, dan modal financial. Dalam banyak kasus, proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melupakan keberadaan modal social. Dari kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan: Segi tiga pilar modal social yang meliputi hubungan saling percaya, pranata, dan jaringan social dengan berbagai komponen didalamnya secara bersama-sama dapat membangun kelompok madani dalam komunitas nelayan. Inter relasi ketiga pilar modal tersebut akhirnya akan bermuara pada sifat hubungan saling percaya antar individu dalam kelompok atau kelompok dengan kelompok. Hubungan saling percaya ini menjadi dasar bagi pendayagunaan modal social dalam praksis kehidupan berkelompok. Berdasarkan pada temuan dilapangan, maka institusi-institusi yang terkait dengan pemberdayaan nelayan sangat penting untuk memperhatikan. Seperti halnya komunitas lain, komunitas nelayan memiliki sumberdaya social yang selama ini disepakati dan diikuti oleh warga. Dengan demikian, pemerintah atau lembaga lain yang akan melaksanakan program pemberdayaan sebaiknya mempertimbangkan eksistensi modal social, baik yang bersifat potensial maupun yang sudah dilaksanakan dalam praksis kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar. 2001. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Agribisnis dan Agroindustri dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Terumbu Karang. <http://rudict.250x.com>

Adisel. 2003. Hubungan Majikan dan Buruh dalam Pengelolaan Penangkapan Ikan di Pasar BengkuluKecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Thesis. PS Pendidikan Ilmu Sosial. Padang. UNP. Tidak ditertibkan.

Karim, Muhammad. 2002. Kegagalan Memberdayakan Nelayan Miskin. <http://www.sinarharapan.co.id>.

Lubis, Zulkifli. 2002. Resisitensi, Persistensi dan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Milik Bersama; Kajian Antropologi Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara. Jakarta. LIPI/RISTEK.

Maleong, Lexy J. 1994. Metode Peneliatian Kualitatif. Bandung. Transito.